

**BAB III**  
**PARTISIPASI POLITIK PEKERJA MIGRAN INDONESIA**  
**DI HONG KONG**

Pada bab ini dijelaskan mengenai partisipasi politik pekerja migran Indonesia di Hong Kong saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dengan menggunakan metode survey secara online melalui google form. Pada bab ini ingin diketahui bagaimana partisipasi politik pekerja migran Indonesia di Hong Kong serta keterlibatan mereka, baik secara aktif maupun pasif. Dalam angket juga dicatumkan soal harapan mereka terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Peneliti turut menampilkan data pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong mengacu dari dokumen Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan data dari komisi pemilihan umum Republik Indonesia (KPU RI).

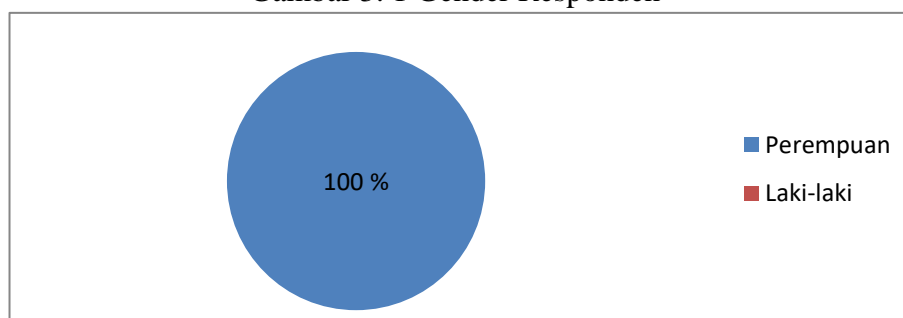
**3.1 Deskripsi Responden**

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan mengenai deskripsi responden. Penjelasan deskripsi responden dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa sampel didalam penelitian bisa mewakili populasi yang diteliti. Responden didalam penelitian ini adalah pekerja migran Indonesia yang berada atau tinggal di Hong Kong saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berlangsung. Pekerja migran Indonesia yang tersebar di beberapa wilayah di Hong Kong dan mempunyai hak pilih dari umur 17 tahun keatas dan memberikan hak pilihnya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2019. Pada

pemilihan yang lalu mereka menggunakan hak pilihnya dengan cara datang langsung ke tempat pemungutan suara yang terbagi menjadi 31 tempat pemungutan suara dan juga melalui pos, ada 19 pos (Data PPID KPU RI, 2019). Jumlah responden dipenelitian ini adalah sebanyak 100 orang yang diambil berdasarkan pada hitungan rumus Slovin. Pada saat pengambilan sampel, semua responden berkenan memberikan tanggapan atas kuesioner yang disebar oleh peneliti dengan berbasis via *online google form*, karena masih pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan data survei lapangan, responden dalam penelitian ini dinilai cukup mencerminkan populasi pemilih pekerja migran Indonesia di Hong Kong dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, karena mengakomodir dan menggambarkan data responden dengan data populasi pemilih pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Penjelasan responden dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin, dan juga pekerjaan. Adapun proporsi responden untuk jenis kelamin, seluruhnya perempuan dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut;

Gambar 3. 1 Gender Responden



Sumber: Data Kuesioner

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa gender responden pada penelitian ini hanya terdiri satu gender yaitu 100 persen responden berjenis kelamin

perempuan. Proporsi jenis kelamin responden tersebut menggambarkan jumlah pemilih pekerja migran Indonesia di Hong Kong dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak pengelola informasi dan dokumentasi komisi pemilihan umum Republik Indonesia, jumlah pemilih baik dari daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN), daftar pemilih tambahan luar negeri (DPTbLN) dan daftar pemilih khusus luar negeri (DPKLN), untuk laki-laki sebanyak 1.138 jiwa atau 0,63 persen dan pemilih perempuan sebanyak 179.876 jiwa atau 99,37 persen (Data PPID KPU RI). Hal ini menunjukkan bahwa proporsi gender responden dalam penelitian ini sudah dapat dikatakan representatif dan mencerminkan populasi pemilih pekerja migran Indonesia di Hong Kong dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Selanjutnya, data demografis lain juga sangat diperlukan untuk memperlihatkan keterwakilan populasi dalam sampel. Data usia responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut;

Tabel 3.1 Usia Responden

Usia Responden	18-25	26-33	34-41	42-49	>50	Total
Persentase	5 %	45 %	42 %	7 %	1 %	100 %
Jumlah Responden	5	45	42	7	1	100

Sumber: Data Kuesioner

Menurut tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa terdapat 5 responden atau 5 persen berusia 18-25 tahun, terdapat 45 responden atau 45 persen berusia 26-33 tahun, terdapat 42 responden atau 42 persen berusia 34-41 tahun, terdapat 7 responden atau 7 persen berusia 42-49 tahun, dan terdapat 1 responden atau 1 persen

berusia >50 tahun. Berdasarkan data tersebut persentase responden terbanyak adalah pada usia 26-33 yaitu sebanyak 45 responden atau sebesar 45 persen. Selanjutnya data mengenai latar belakang pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut;

Tabel 3.2 Pendidikan Responden

Pendidikan Responden	Tidak Tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMA	Tamat DIII/S1	Total
Persentase	2 %	1 %	29 %	49 %	19 %	100 %
Jumlah Responden	2	1	29	49	19	100

Sumber: Data Keusioner

Berdasarkan tabel 3.2 diatas dapat diketahui bahwa terdapat 2 responden atau 2 persen yang latar belakang pendidikan tidak tamat sekolah dasar, terdapat 1 responden atau 1 persen yang latar belakang pendidikan tamat sekolah dasar, terdapat 29 responden atau 29 persen yang latar belakang pendidikan tamat sekolah menengah pertama, terdapat 49 responden atau 49 persen yang latar belakang pendidikan tamat sekolah menengah atas, terdapat 19 responden atau 19 persen yang latar belakang pendidikan tamat diploma III atau sarjana. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa latar belakang pendidikan responden peringkat paling banyak adalah responden lulusan sekolah menengah atas, yaitu sebanyak 49 responden, kemudian lulusan sekolah menengah pertama sebanyak 29 responden, dan disusul lulusan diploma III atau sarjana sebanyak 19 responden. Data diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden didominasi pendidikan menengah. Selanjutnya data mengenai status pekerjaan responden dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut;

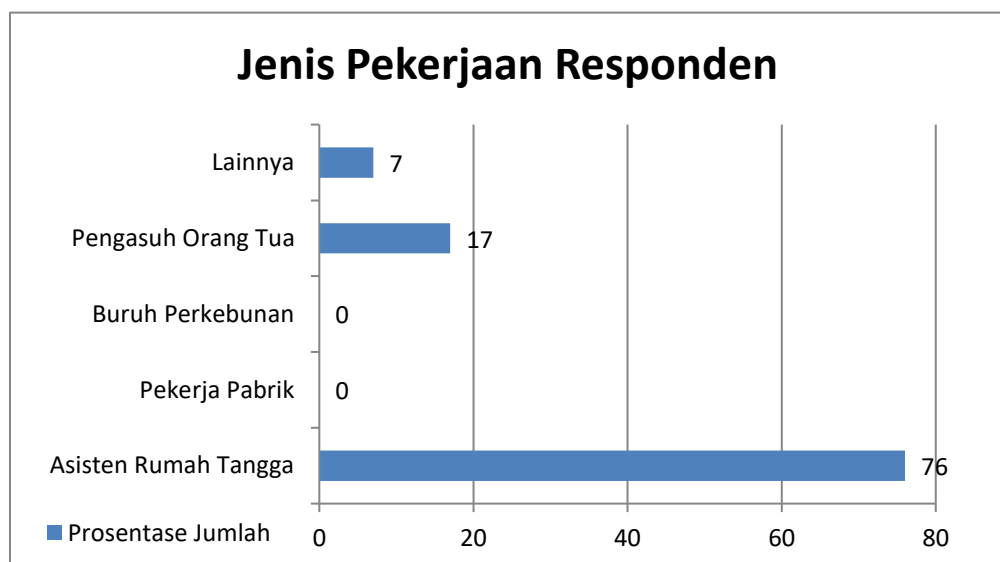
Tabel 3.3 Jenis Pekerjaan Responden

Status Pekerjaan Responden	Asisten Rumah Tangga	Pekerja Pabrik	Buruh Perkebunan	Pengasuh Orang Tua	Lainnya	Total
Persentase	76 %	-	-	17 %	7 %	100 %
Jumlah Responden	76	-	-	17	7	100

Sumber: Data Keusioner

Dari tabel 3.3 diatas dapat diketahui status pekerjaan responden, yaitu sebanyak 76 responden atau 76 persen bekerja pada sektor sebagai asisten rumah tangga, sementara itu untuk sektor pekerja pabrik dan buruh perkebunan nihil atau tidak ada, kemudian terdapat 17 responden atau 17 persen disektor sebagai pengasuh orang tua, dan terdapat 7 responden atau 7 persen sektor lainnya. Jenis pekerjaan ini dapat ditampilkan dalam sebuah grafik akan terlihat pada grafik 3.1;

Grafik 3.1 Pekerjaan Responden



Sumber: Data Keusioner

Seperti yang sudah ditampilkan dalam tabel dan juga grafik bahwa mayoritas pekerja migran Indonesia di Hong Kong adalah berprofesi sebagai asisten rumah tangga, hal ini tidak terlepas dari faktor kondisi dan jenis ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada serta tingkat pendidikan. Data survei ini yang memperlihatkan bahwa 76 persen atau mayoritas responden bekerja pada sektor asisten rumah tangga memperlihatkan adanya kemiripan dengan data badan perlindungan pekerja migran Indonesia.

### **3.2 Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong dalam Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia**

Upaya yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah dengan bekerja. Menjadi pekerja migran merupakan salah satu jenis pekerjaan yang rentan dengan berbagai macam resiko, perdagangan manusia, kekerasan, pelecehan seksual maupun yang lainnya. Karena dalam faktanya, pekerjaan ini bukan hanya melibatkan individu dan juga negara asalnya akan tetapi juga negara penempatan atau negara yang dituju untuk bekerja. Sehingga definisinya dari pekerja migran Indonesia adalah seseorang yang berpindah dari satu tempat atau negara ke tempat atau negara yang berbeda dan menemukan perbedaan kebiasaan dalam hal nilai, aturan dari tempat asal dan mereka harus mampu beradaptasi (Kusumastuti, Thiesmeyer, 2020). Pemenuhan itu menjadi salah satu cara bagi rakyat untuk merubah dirinya kekehidupan yang lebih baik lagi. Namun terjadinya migrasi internasional bukan karena di negara asalnya ada perang tapi bisa saja ada hal-hal menarik di negara baru yang pada akhirnya menjadi

penarik bagi seseorang untuk melakukan migrasi internasional maupun bekerja di negara yang dituju.

Selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil telaah dari dokumen badan perlindungan pekerja migran Indonesia yang berkaitan dengan data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia rentang tahun 2017-2019. Peneliti tampilkan agar menjadi gambaran yang komperhensif untuk melihat secara utuh terkait pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong. Berikut data mengenai penempatan pekerja migran Indonesia di Hong Kong.

Tabel 3.4 Penempatan pekerja migran Indonesia di Hong Kong periode 2017 s.d 2019

NEGARA	2017	2018	2019
HONG KONG	69.182	73.917	70.840

Sumber: BP2MI

Berdasarkan data diatas, Hong Kong menjadi negara favorit penempatan pekerja migran Indonesia. Disisi lain, negara Hong Kong belum sempurna dalam mengatur masalah pekerja migran dan gaji akan tetapi Hong Kong sudah ada sebuah peraturan dengan sistem ketenagakerjaan yang baik yaitu penyediaan akses layanan gratis untuk konsultasi maupun layanan hukum bagi pekerja migran yang mangalami masalah (Larasati, 2018). Jaminan keselamatan, pekerjaan yang layak terhadap pekerja migran akan menjadi prioritas bagi negara asal maupun bagi pekerja migran Indonesia itu sendiri, mengingat pekerja migran berada di negara orang. Ketika kita berada di negara orang tentunya mempunyai suatu kehidupan sosial yang berbeda dengan negara asal maka daripada itu pekerja migran harus bisa mampu penyeimbangan dan juga beradaptasi baik bagi keamanan diri sendiri juga

bagi kebaikan negara baik negara penerima maupun negara asal. Di kawasan Asia Pasifik Hong Kong menjadi negara penerima pekerja migran Indonesia tertinggi dengan angka 70.840 pada tahun 2019 (Bnp2tki, 2020). Kemudian peneliti tampilkan terkait surat izin pengerahan menuju ke negara Hong Kong.

Tabel 3.5 Penerbitan surat izin pengerahan di Hong Kong tahun 2017 S.D 2019

NEGARA	2017	2018	2019
HONG KONG	100	27	63.764

Sumber: BP2MI

Hong Kong menjadi negara yang bersahabat atau ramah dengan pekerja migran Indonesia. Selain itu budaya yang kurang lebih sama dan sistem jaminan yang bagus menjadi penarik bahwa pekerja migran Indonesia beserta pemerintah Indonesia percaya untuk menjadikan Hong Kong sebagai tujuan pekerja migran Indonesia. Bahkan bukan faktor itu saja, Hong Kong menjadi favorit bagi pekerja migran Indonesia karena wilayah otonomi Republik Rakyat China ini telah masuk dalam lingkup wilayah maju, modern dan upah yang cukup tinggi.

Tabel 3.6 Jumlah kedatangan pekerja migran Indonesia dari Hong Kong

Tahun 2017 S.D 2019

NEGARA	2017	2018	2019
HONG KONG	35.616	10.258	16.397

Sumber: BP2MI

Dari data diatas terlihat bahwa antusiasme masyarakat Indonesia menjadi pekerja migran ke Hong Kong. Dalam hal yang sama pemerintah juga mendukung masyarakatnya menjadi pekerja migran ke Hong Kong, mengingat lapangan



pekerjaan di Indonesia masih terbatas. Peneliti juga tampilkan data pengaduan kasus pekerja migran Indonesia di Hong Kong, tabelnya sebagai berikut:

Tabel 3.7 Jumlah pengaduan kasus di Hong Kong tahun 2017 S.D 2019

NEGARA	2017	2018	2019
HONG KONG	103	163	207

Sumber: BP2MI

Berdasar data diatas, nampak jelas bahwa Hong Kong bukan sebuah negara yang sempurna untuk tujuan pekerja migran Indonesia. Jika dikaitkan dengan ketertarikan untuk memilih menjadi pekerja migran Indonesia di Hong Kong, Hong Kong adalah sebuah negara maju dan juga modern. Negara tersebut maju maka bukan hanya pada aspek ekonomi tetapi aspek sosial dan politik serta keamanan. Ekonomi suatu negara menjadi perhatian tersendiri bagi negara pengirim seperti Indonesia. Pekerja migran Indonesia bekerja di Hong Kong dengan harapan bisa membangun ekonomi rumah tangganya karena upah yang sewaktu menjadi pekerja migran cukup tinggi dan bisa dikirimkan ke anggota keluarga yang berada dirumah. Namun, ketika seseorang itu pergi dan meninggalkan batas negara untuk bekerja maka bukan semata-mata faktor ekonomi akan tetapi juga faktor keamanan menjadi perhatian. Hong Kong memiliki sistem jaminan pekerja yang bagus sehingga bisa meyakinkan Indonesia untuk memberangkatkan warganya menjadi pekerja migran Indonesia ke Hong Kong.

Tabel 3.8 Remitansi pekerja migran Indonesia di Hong Kong tahun 2017 s.d 2019

NEGARA	Juta USD		
	2017	2018	2019
HONG KONG	814	1058	1229

Sumber: BP2MI & BI

Melihat tabel diatas bahwa, uang remitansi yang dikirimkan oleh pekerja migran Indonesia dari Hong Kong cukup besar. Uang remitansi ini selain bisa membantu perekonomian rumah tangga juga membantu perekonomian negara. Jaminan pekerjaan menjadi hal dasar ketika sebuah negara mengirimkan pekerja migran ke negara penerima, maka harus benar-benar selektif dan hati-hati dalam melakukan kerjasamanya. Bukan hanya pada jaminan tentang kehidupan tetapi mulai dari hak terkait ekonomi (gaji) hingga masalah individu harus dijalankan oleh pihak negara penerima pekerja migran. Begitu juga sebaliknya, pekerja migran sendiri juga harus menjalankan apa yang menjadi kewajibannya sebagai pekerja. Ini adalah kondisi yang mungkin terlihat sederhana tetapi bila dilihat kembali merupakan hal utama untuk menjaga hak-kewajiban masing-masing dan perlindungan.

Sebuah keselamatan kerja, pada kondisi yang maju akan industrialisasi, modernisasi, mekanisme itu semua membutuhkan pengarahan yang sangat mendalam terkait dengan kebutuhan pekerja agar pekerja merasa nyaman dan juga aman (Suhartoyo, 2019). Kondisi ini sejajar dengan negara Hong Kong yang menjadi tujuan utama pekerja migran Indonesia untuk bekerja. Masalah pertama adalah pendapatan di Hong Kong menjadi hal yang menarik karena tinggi. Pendapatan menjadi pekerja migran di Hong Kong pada kisaran kurang lebih 7 juta

– 15 juta tanpa keahlian apapun. Hal ini menjadi salah satu daya tarik karena pekerja migran Indonesia berharap dengan bekerja di Hong Kong dapat menaikkan kondisi ekonomi keluarga. Nampak pada data diatas menunjukkan jika data remitansi dari para pekerja migran Indonesia di Hong Kong juga cukup tinggi. Kemudian peneliti juga tampilkan data persebaran asal provinsi untuk para pekerja migran Indonesia ke Hong Kong:

Tabel 3.9 Jumlah data penempatan pekerja migran Indonesia ke Hong Kong menurut asal provinsi di Indonesia periode tahun 2018 s.d 2020

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>JUMLAH</b>
1	ACEH	0	1	1	2
2	BALI	36	12	14	62
3	BANGKA BELITUNG	4	3	3	10
4	BANTEN	206	232	165	603
5	BENGKULU	97	21	20	138
6	DI YOGYAKARTA	250	117	141	508
7	DKI JAKARTA	227	203	153	583
8	GORONTALO	25	0	0	25
9	J A M B I	17	14	17	48
10	JAWA BARAT	11.916	12.408	8.281	32605
11	JAWA TENGAH	18.959	18.179	13.500	50638
12	JAWA TIMUR	34.486	31.855	25.337	91678
13	KALIMANTAN BARAT	41	23	22	86
14	KALIMANTAN SELATAN	56	29	44	129
15	KALIMANTAN TENGAH	28	9	7	44
16	KALIMANTAN TIMUR	21	13	14	48
17	KALIMANTAN UTARA	0	0	0	0
18	KEPULAUAN RIAU	31	11	12	54
19	LAMPUNG	3.856	4.133	2.918	10907
20	MALUKU	6	4	3	13
21	MALUKU UTARA	0	0	0	0
22	NUSA TENGGARA BARAT	2.668	2.665	1.784	7117
23	NUSA TENGGARA TIMUR	243	208	177	628
24	PAPUA	0	0	0	0
25	PAPUA BARAT	0	0	0	0

26	RIAU	10	6	14	30
27	SULAWESI BARAT	11	9	10	30
28	SULAWESI SELATAN	52	31	34	117
29	SULAWESI TENGAH	114	110	94	318
30	SULAWESI TENGGARA	139	72	28	239
31	SULAWESI UTARA	238	272	235	745
32	SUMATERA BARAT	0	0	0	0
33	SUMATERA SELATAN	147	144	145	436
34	SUMATERA UTARA	34	56	33	123
<b>TOTAL JUMLAH</b>		75936	72859	55226	197964

Sumber: BP2MI

Nampak dari data diatas menunjukkan jika persebaran provinsi para pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong sangat beragam, memang dominasi persebaran masih di provinsi Jawa yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Juga Jawa Barat. Tidak berarti provinsi diluar Jawa tidak ada, buktinya ada Lampung dan juga Nusa Tenggara Barat, banyak warganya menjadi pekerja migran Indonesia ke Hong Kong.

### **3.3 Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong Dalam Data Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**

#### **3.3.1 Pemilihan Umum**

Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan pemilihan umum adalah suatu proses atau cara yang dilakukan untuk memilih dengan cara bersama-sama atau serentak oleh seluruh rakyat. Konsepnya dalam pemilihan umum merupakan komponen untuk tercapainya kedaulatan rakyat dengan maksud membentuk sebuah pemerintahan yang legal serta sebagai sarana menerjemahkan aspirasi dan kepentingan rakyat (Labolo, Ilham: 2015).

Secara teknik operasional yang dikatakan oleh para ahli bahwa pemilihan umum yang diartikan sebagai pemilihan umum dari cara pandang teknik pelaksanaannya. Pemilihan umum merupakan pemberian suara dari masyarakat melalui cara dicoblos pada tanda gambar atau nomornya untuk memilih wakil-wakil rakyat. Secara lebih luas lagi pemilihan umum adalah sebuah cara yang didalamnya terdapat suara-suara yang didapat dalam pemilihan dan diterjemahkan menjadi kursi, dimenangkan dalam parlemen oleh partai politik dan juga para kandidat.

Orang yang memilih dalam pemilihan umum juga disebut sebagai konstituen, para peserta pemilihan umum mengobrol janji serta program saat masa kampanye berlangsung. Kampanye dilaksanakan dengan durasi yang sudah ditentukan oleh panitia sampai dengan hari pemungutan suara dilakukan. Sehabis pemungutan suara dilaksanakan, proses selanjutnya adalah penghitungan. Kandidat yang menang dalam pemilihan umum sudah ditentukan oleh aturan main yang berlaku. Sistem penentuan menjadi pemenang, sebelumnya sudah disosialisasikan ke pemilih, disetujui dan juga ditetapkan oleh panitia penyelenggara.

Maksud dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemilihan umum merupakan sebuah proses pemilihan atau menentukan sikap yang dikerjakan oleh rakyat untuk memilih penguasa maupun pejabat politik dalam memimpin suatu negara dan diselenggarakan juga oleh negara. Setiap warga negara mendapatkan hak untuk mengikuti dalam pemilihan umum. Hak warga negara bisa ikut dalam pemilihan umum disebut juga hak pilih. Hak pilih terdiri dari hak pilih yang aktif (hak memilih) dan juga hak yang pilih pasif (hak dipilih). Semua warga negara

Indonesia yang saat pemilihan sudah memenuhi persyaratan yaitu mempunyai umur tujuh belas tahun maupun lebih atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih maupun dipilih. Setiap warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak memilih, bisa menggunakan hak memilihnya dengan catatan telah terdaftar sebagai pemilih yang dikeluarkan oleh panitia pemilihan (Rozali: 2009). Seseorang yang mempunyai hak pilih harus memenuhi persyaratan, diantaranya:

- a. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- b. Tidak dicabut hak pilihnya yang berdasarkan putusan pengadilan dan juga mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan warga negara Indonesia yang sudah terdaftar didalam daftar pemilih tetap akan tetapi kemudian faktanya tidak lagi memenuhi persyaratan-persyaratan diatas, maka tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Masalah maupun gejala ditingkatan masyarakat tentunya ada, ini disebabkan oleh tidak validnya data pemilih dari panitia penyelenggara. Warga masyarakat yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk memilih, akan tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, sebaliknya orang yang sudah tidak ada atau meninggal dunia datanya masih ada dalam daftar pemilih tetap. Sesungguhnya permasalahan ini hanya bersifat teknis dan administratif semata, akan tetapi oleh beberapa pihak yang merasa dirugikan, ini menjadi masalah besar dan dipolitisasi sehingga sering kali menimbulkan gejala maupun konflik. Menurut pengamatan, ketidak akuratan data pemilih dalam daftar pemilih tetap dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Data kependudukan yang belum tertata dengan rapi. Masalah ini merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah yaitu Kementerian Dalam Negeri.
- b. Verifikasi data atau biasa disebut pemutahiran data pemilih dilakukan sama komisi pemilihan umum dengan baik.
- c. Warga pada khususnya yang sudah mempunyai hak pilih untuk aktif mencari tahu apakah namanya tercantum atau tidak dalam daftar pemilih tetap.

### 3.3.2 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui pemilihan umum yang dipilih secara langsung oleh seluruh warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih dan juga terdaftar sebagai pemilih. Pasal yang berisi tentang aturan dalam pemilihan umum yaitu pasal 22 E dan pasal 6 A. Di pasal 22 E diterangkan bahwa pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun sekali. Ini berarti masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama 5 tahun dalam satu periode kepemimpinan. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh komisi pemilihan umum. Pemilihan umum yang dilakukan di Indonesia dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia. Dalam melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berbeda dengan dulu. Dulu Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh majelis permusyawaratan rakyat akan tetapi saat ini dipilih langsung oleh rakyat. Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik. Kemudian sebagai panitia pemilihan yang ditunjuk oleh undang-undang yaitu komisi pemilihan umum dan berjalan sesuai dengan

aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Umumnya pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara bersamaan di Indonesia akan tetapi untuk yang diluar negeri berbeda waktunya. Saat pemilihan berjalan masyarakat berhak memilih Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan hati nuraninya, ini pastinya sesuai dengan nama dan juga gambar yang ada dikertas suara. Hasil pemilihan merupakan kehendak rakyat dan ini hasil akir serta menjadi sebuah keputusan mutlak bagi semua calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Bila ada ketidakpuasan atau kekecewaan dari hasil tersebut maka caranya adalah menggugat di Mahkamah Konstitusi. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam penelitian ini adalah pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 2019 di Hong Kong.

Peneliti akan memaparkan secara terperinci mengenai rekapitulasi dari pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Hong Kong baik terkait data pemilih, data pemilih disabilitas, data penggunaan surat suara, serta data perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ada di Hong Kong. Di Hong Kong terdapat 19 pos dan ada 31 tempat pemungutan suara dalam penyelenggaraannya, untuk pengadaan tempat pemungutan suara oleh Konsulat Jendral Republik Indonesia di Hong Kong disebar di 3 wilayah, yaitu di Queen Elizabeth Stadium, di kawasan Kowloon dan New Territories.

#### 3.3.2.1 Data Pemilih

Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk menentukan siapa yang nanti akan mewakili untuk duduk dianggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk



memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat propinsi maupun kabupaten atau kota. Pemilihan umum ini dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peserta dari pemilihan umum yaitu partai politik untuk pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten maupun kota. Individu untuk pemilihan calon anggota dewan perwakilan daerah. Sedangkan untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik, secara jelas tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sementara itu masalah pemilih sendiri adalah warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat dan juga terdaftar sebagai pemilih.

Berikut peneliti tampilkan secara rinci data pemilih Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Hong Kong.

Tabel 3.10 Data pemilih di Hong Kong

No	Data Pemilih	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Jumlah Pemilih dalam DPTLN (Model A.3 LN-KPU)	1.033	179.164	180.197
2.	Jumlah Pemilih dalam DPTbLN (Model A.DPKLN-KPU)	3	6	9
3.	Jumlah Pemilih dalam DPKLN-KPU (Model A.DPKLN-KPU)	102	706	808
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	1.138	179.876	181.014

Sumber: PPID KPU RI

Pada tabel 3.10 nampak jika daftar pemilih tetap luar negeri terdapat 180.197 pemilih dengan rincian 1033 laki-laki dan 179.164 perempuan. Selanjutnya terdapat

penambahan dari daftar pemilih tambahan luar negeri berjumlah 9 orang yang terdiri dari 3 laki-laki dan 6 perempuan. Selanjutnya daftar pemilih khusus sejumlah 808 dengan rincian laki-laki ada 102 dan 706 untuk perempuan. Hingga akhirnya secara total untuk jumlah data pemilih adalah 181.014 data pemilih, dengan rincian 179.876 perempuan dan 1.138 laki-laki.

### 3.3.2.2 Pengguna Hak Pilih

Setelah peneliti tampilkan data pemilih berdasarkan dokumen dari komisi pemilihan umum, selanjutnya peneliti tampilkan pengguna hak pilih untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 bagi pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Adapun detail datanya bisa dilihat dalam Tabel 3.11 di bawah ini :

Tabel 3.11 Pengguna Hak Pilih

No	Pengguna Hak Pilih	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPTLN (Model C.7 LN-KPU)	350	45.855	46.205
2.	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPTbLN (Model C.7 DPKLN-KPU)	3	3	6
3.	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPKLN-KPU (Model C.7 DPKLN-KPU)	11	288	299
4.	Jumlah Pemilih (B.1+B.2+B.3)	364	46.146	46.510

Sumber: PPID KPU RI

Dari tabel diatas menunjukkan jika terdapat sejumlah 46.205 pemilih dalam daftar pemilih tetap luar negeri yang menggunakan hak pilihnya, terdiri dari 350 laki-laki dan 45.855 perempuan. Selain itu ada juga pengguna hak pilih dari daftar pemilih tetap tambahan luar negeri yaitu sejumlah 6 pemilih, terdiri dari 3 unsur perempuan dan 3 unsur laki-laki. Sementara dari daftar pemilih khusus luar negeri

juga terdapat pengguna hak pilih yaitu sejumlah 299 pemilih, dengan rincian 11 laki-laki dan 288 perempuan. Secara keseluruhan jumlah pengguna hak pilih adalah 46.510 dengan rincian 364 laki-laki dan 46.146 perempuan.

### 3.3.2.3 Data Pemilih Disabilitas

Berikut daftar pemilih disabilitas di Hong Kong:

Tabel 3.12 Data Pemilih Disabilitas

<b>Data Pemilih Disabilitas</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas terdaftar dalam DPTLN, DPTbLN, DPKLN	2	0	2

Sumber : PPID KPU RI

Tabel diatas menunjukkan jika terdapat pemilih disabilitas yang berjumlah 2 dari kalangan laki-laki sedangkan dari perempuan berjumlah 0 (nol).

### 3.3.2.4 Data Penggunaan Surat Suara

Selanjutnya peneliti tampilkan penggunaan surat suara dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 di Hong Kong. Secara detail datanya bisa melihat tabel dibawah ini :

Tabel 3.13 Data Penggunaan Surat Suara

<b>No</b>	<b>Data Penggunaan Surat Suara</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2 % dari DPTLN (2+3+4)	183.914
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	198
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan (3.a+3.b.+3.c)	137.206
	Surat suara tidak dikembalikan oleh Pemilih	9.970
	Surat suara kembali ke PPLN (return to sender)	2.238
	Surat suara tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	124.997
4.	Jumlah surat suara yang digunakan	46.510

Sumber : PPID KPU RI

Tabel 3.13 memperlihatkan jika jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2 % dari daftar pemilih tetap luar negeri berjumlah 183.914, kemudian secara terperinci terdapat jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos berjumlah 198, kemudian jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 137.206. Ini terkumpul dari surat suara tidak dikembalikan oleh pemilih berjumlah 9.970, kemudian surat suara kembali ke panitia pemilihan luar negeri (*return to sender*) berjumlah 2.238, selanjutnya surat suara tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sejumlah 124.997. Hingga akhirnya surat suara yang secara pasti digunakan sejumlah 46.510.

#### 3.3.2.5 Data Perolehan Suara

Berikut peneliti juga tampilkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang diselenggarakan di Hong Kong. Secara detail bisa dilihat pada data di bawah ini :

Tabel 3.14 Data Perolehan Suara

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
01	Ir. H. JOKO WIDODO – Prof.Dr. (H.C) KH MA'RUF AMIN	38.945
02	H. PRABOWO SUBIANTO – H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO	5.967

Sumber : PPID KPU RI

Komisi pemilihan umum melakukan rapat pleno terbuka dalam rekapitulasi nasional lanjutan dari hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2019 di luar negeri. Surat suara yang direkapitulasi adalah dari dari Hong Kong, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf

Amin berhasil menang dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Ketua penyelenggara pemilihan luar negeri Hong Kong mengatakan, bahwa kemenangan yang didapatkan oleh petahana lebih banyak enam kali dari penantangya. Suara yang didapatkan oleh pasangan calon nomor urut 01 sebanyak 38.945 suara, sementara itu pasangan calon nomor urut 02 sebanyak 5.967 suara, ini adalah hasil dari rekapitulasi diformulir model DA I luar negeri. Jumlah warga negara Indonesia yang berada di Hong Kong dan terdaftar sebagai pemilih sebanyak 181.009 orang. Pemilih ini terdiri dari daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan dan pemilih kategori khusus dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2019 di Hong Kong. Dari daftar pemilih tetap, total yang memilih sebanyak 45.464, jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 46.510 surat suara. Total surat suara sebanyak 183.914 dengan rinciannya sebagai berikut; 9.970 surat suara dari pos tidak kembali, surat suara 2.238 dikirim kembali dari panitia pemilihan luar negeri serta sebanyak 124.997 surat suara tak terpakai<sup>13</sup>.

#### 3.3.2.6 Data Surat Suara Sah dan Tidak Sah

Berikut peneliti tampilkan surat suara sah dan suara tidak sah dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 di Hong Kong. Secara detail bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

---

<sup>13</sup> Hutabarat, Delvira. Rekapitulasi Suara Luar Negeri: Jokowi-Ma'ruf Menang Telak di Hong Kong. Mei 5, 2019. <https://www.liputan6.com/pilpres/read/3957739/rekapitulasi-suara-luar-negeri-jokowi-maruf-menang-telak-di-hong-kong>. Diakses pada tanggal 28 mei 2022.

Tabel 3.15 Data Surat Suara Sah dan Tidak Sah

No	Data Suara Sah dan Tidak Sah	Jumlah
1	Jumlah seluruh suara sah (01 + 02)	44.912
2	Jumlah Suara tidak sah	1.598
3	Jumlah seluruh Suara Sah dan Suara tidak sah (A + B)	46.510

Sumber : PPID KPU RI

Berdasarkan tabel diatas, hasil dari rekapitulasi bahwa surat suara sah untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019 di Hong Kong sebanyak 44.912 suara, sedangkan surat suara tidak sah mencapai 1.598 surat suara dan total secara keseluruhan sebanyak 46.510 surat suara.

### **3.4 Partisipasi Politik Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019.**

Partisipasi politik merupakan sebuah aktivitas warga negara baik dilaksanakan secara langsung maupun secara tidak langsung. Masalah dengan kebijakan pemerintah bisa dilaksanakan oleh individu maupun kelompok secara tiba-tiba maupun diorganisir yang bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah (Wardhani, 2018:59). Partisipasi politik merupakan sebuah tindakan oleh rakyat yang mempunyai maksud untuk mempengaruhi keputusan dalam banyak kesempatan serta pada akhirnya bisa diambil oleh perwakilan dan juga pejabat publik (Van Deth, 2001:4). Partisipasi politik adalah aktivitas-aktivitas yang ditujukan untuk mempengaruhi dalam pemilihan pejabat pemerintah dan juga untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil (Boulding, Houlzner,

2021:25). Jadi sudah jelas bahwa partisipasi politik merupakan sebuah kegiatan individu maupun kelompok yang berhubungan dengan politik secara aktif.

Studi partisipasi politik menjadi bagian dari sebuah pendekatan tingkah laku (behavioralism) dalam ilmu politik, komponen penting dari studi pembangunan politik. Pembangunan politik yang ditujukan sebagai respon dari barat dalam perannya bagi negara berkembang atau dunia ketiga. Studi yang mempelajari partisipasi politik tidak menjadi milik dunia barat sendiri dan juga terjadi di barat, studi ini justru di negara berkembang atau di negara dunia ketiga. Dunia ketiga malahan yang sangat sering dijadikan objek maupun subjek. Partisipasi politik secara umum merupakan aktivitas individu maupun kelompok untuk berperan serta secara aktif dalam aktivitas politik dengan cara, memilih pimpinan negara baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi kebijakan dari pemerintah (Darmayadi, 2011:61-62). Makna dari partisipasi politik sendiri dilakukan pada aktivitas orang dari banyak tingkatan sistem politik contohnya adalah seorang pemilih atau pemberi suara ikut partisipasi dengan mencoblos atau memberikan suaranya, seorang Menteri Luar Negeri partisipasi untuk menetapkan kebijaksanaan luar negeri. Makna tersebut diterapkan dalam orientasi politik disetiap aktivitas politik karena rakyat berpartisipasi dengan menaruh keinginan dalam politik. Partisipasi politik sebuah aktivitas suka rela yang sukses maupun gagal, yang terorganisir maupun tidak, jarang-jarang maupun terus menerus, dengan memakai cara yang sah maupun yang tidak sah untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, penyelenggaraan pemerintah maupun pemilihan pemimpin

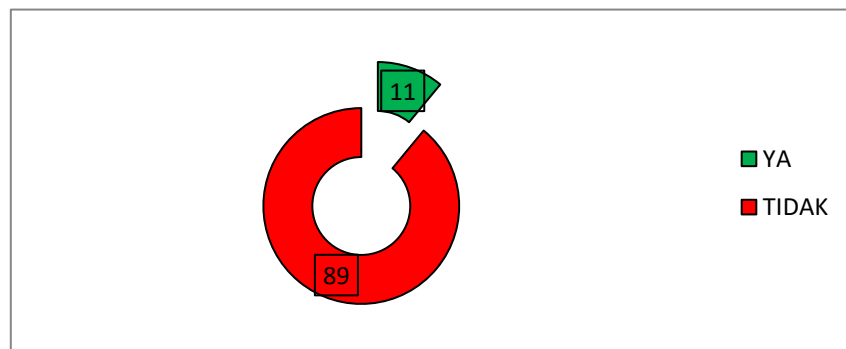
politik serta pemerintah di tingkatan lokal, daerah dan juga nasional (Suharyanto, 2014:153).

Terkait dengan penelitian ini, peneliti telah menyebar kuesioner berbasis online kepada 100 responden dari unsur pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong. Berikut kami tampilkan rincian jawaban tiap pertanyaan dalam kuesioner oleh responden.

#### 3.4.1 Relawan atau Tim Sukses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019.

Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 100 responden mengenai status responden apakah termasuk relawan ataupun tim sukses dari salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2019, memperlihatkan bahwa mayoritas responden menyatakan tidak menjadi bagian dari relawan maupun tim sukses, adapun data kuesioner tersebut dapat dilihat pada Grafik 3.2 berikut;

Grafik 3.2 Relawan atau Tim Sukses



Sumber: Data Kuesioner

Dari grafik 3.2. diatas memperlihatkan sebanyak 89 responden menyatakan TIDAK menjadi bagian dari relawan maupun tim sukses pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2019, sementara 11 responden lainnya

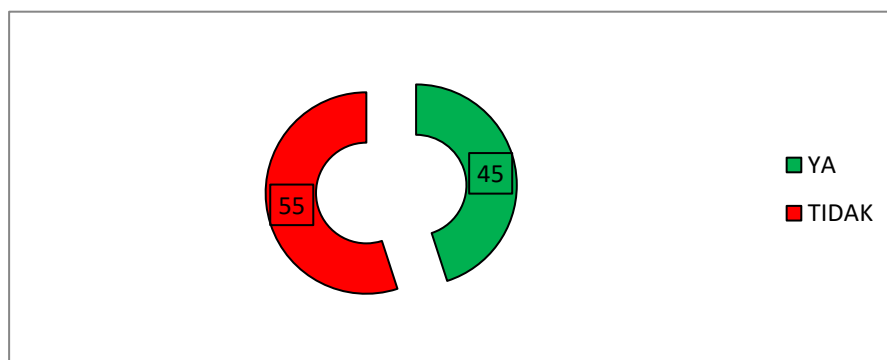


menyatakan YA menjadi bagian dari relawan maupun tim sukses pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

#### 3.4.2 Keikutsertaan Sosialisasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2019.

Pertanyaan selanjutnya adalah terkait keikutsertaan responden dalam sosialisasi tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2019, adapun data kuesioner dapat dilihat pada grafik 3.3, berikut;

Grafik 3.3 Keikutsertaan Dalam Sosialisasi



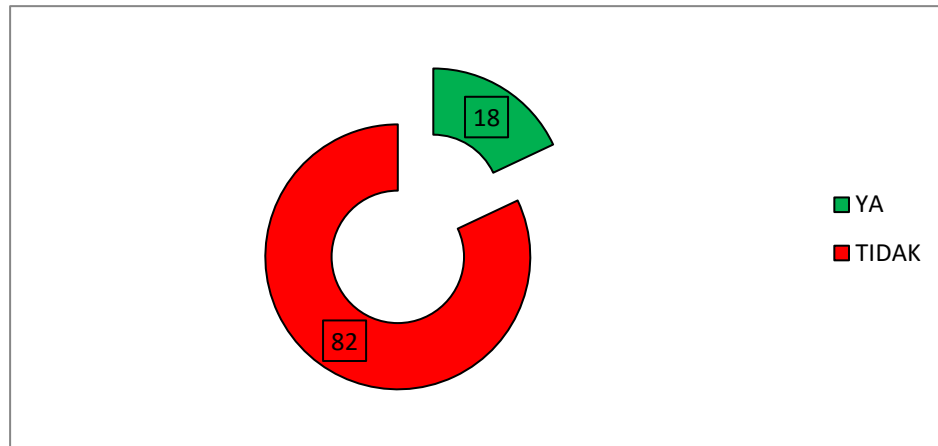
Sumber: Data Kuesioner

Dari grafik 3.3. diatas memperlihatkan sebanyak 55 responden menyatakan TIDAK pernah mengikuti sosialisasi terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, sementara 45 responden lainnya menyatakan YA pernah mengikuti sosialisasi terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

#### 3.4.3 Keaktifan Dalam Kegiatan Politik

Kemudian yang ditanyakan lagi oleh peneliti dalam kuesioner kepada responden adalah keaktifan responden dalam kegiatan politik. Adapun data kuesioner tersebut dapat dilihat pada grafik 3.4, berikut;

Grafik 3. 4 Keaktifan Dalam Kegiatan Politik



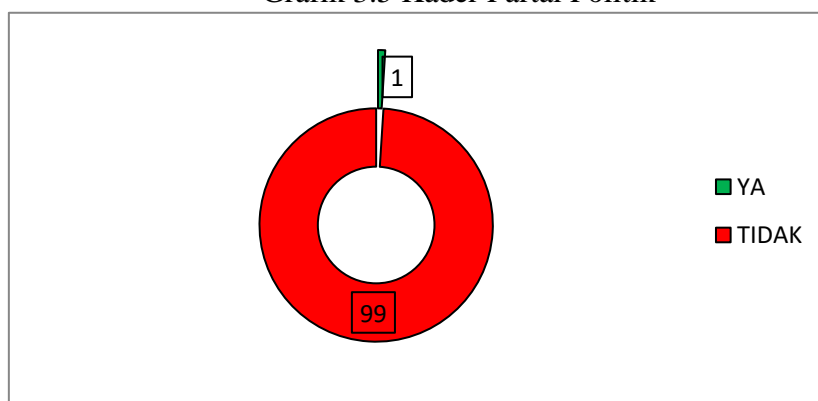
Sumber: Data Kuesioner

Berdasarkan grafik 3.4. diatas menunjukkan jika 82 responden menyatakan TIDAK aktif dalam kegiatan politik, sementara terdapat 18 responden yang menyatakan YA aktif dalam kegiatan politik.

#### 3.4.4 Kader Partai Politik

Selain soal keaktifan kegiatan politik, peneliti dalam kuesioner juga bertanya kepada responden terkait status yang bersangkutan apakah turut jadi bagian dari kader sebuah partai politik atau tidak. Adapun hasil dari survey tersebut dapat dilihat pada grafik 3.5, berikut:

Grafik 3.5 Kader Partai Politik



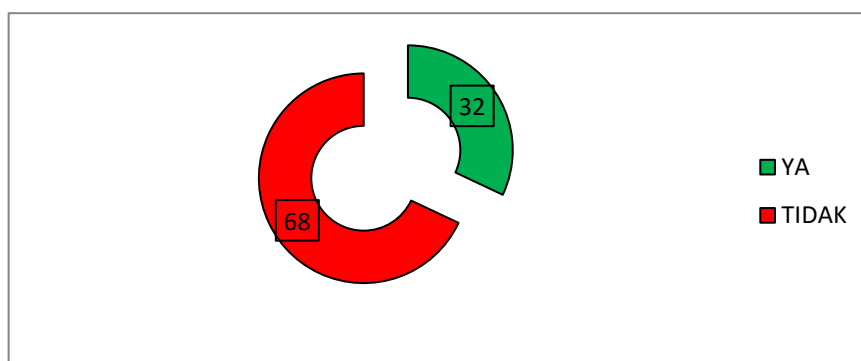
Sumber: Data Kuesioner

Grafik 3.5 diatas menunjukkan hanya 1 responden yang menyatakan YA menjadi bagian dari kader partai politik, sementara 99 responden lainnya menyatakan TIDAK menjadi bagian dari kader partai politik.

#### 3.4.5 Keikutsertaan Kampanye

Pertanyaan selanjutnya yang turut ditujukan kepada responden dalam kuesioner adalah soal pernah tidaknya ikut serta dalam kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2019. Adapun data kuesioner tersebut dapat dilihat pada grafik 3.6, berikut;

Grafik 3.6 Keikutsertaan Kampanye



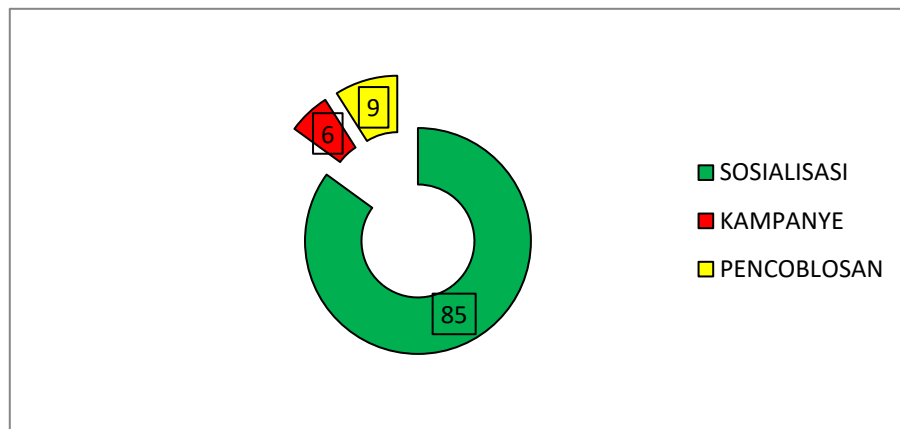
Sumber: Data Kuesioner

Grafik 3.6 memperlihatkan jika ada 32 responden yang mengungkapkan YA pernah mengikuti kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019, sementara itu terdapat 68 responden yang menyatakan TIDAK pernah mengikuti kampanye.

#### 3.4.6 Partisipasi Tiap Tahapan

Berkaitan dengan tahapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, peneliti turut bertanya kepada responden mulai pada tahapan apa responden berpartisipasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Adapun data kuesioner tersebut dapat dilihat pada grafik 3.7, berikut;

Grafik 3.7 Partisipasi Tiap Tahapan



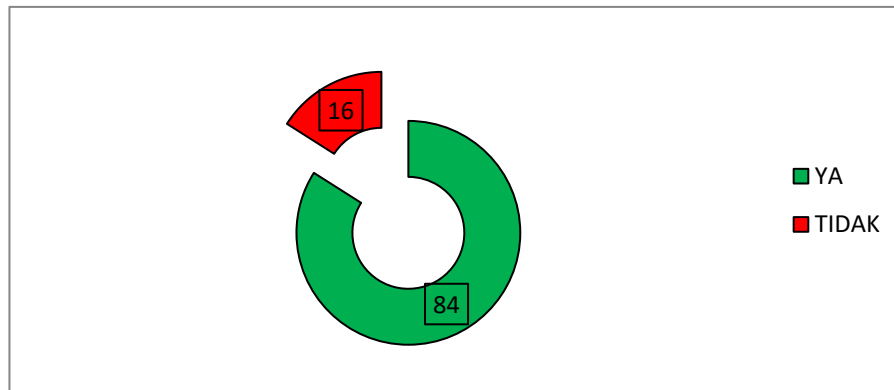
Sumber: Data Kuesioner

Grafik 3.7. menunjukkan jika dominasi dari responden terkait mulai pada tahapan apa mereka mulai berpartisipasi, ada 85 responden menyatakan mulai terlibat pada tahapan sosialisasi, kemudian ada 6 responden yang mulai terlibat pada tahapan kampanye, sementara itu yang pada tahapan pencoblosan terdapat 9 responden.

#### 3.4.7 Menggunakan Hak Pilih Bagian Dari Partisipasi Politik

Pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan peneliti kepada responden adalah soal ketika responden sudah menggunakan hak pilih dengan memilih calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2019, apakah hal tersebut bagian dari partisipasi politik. Adapun data kuesioner tersebut dapat dilihat pada grafik 3.8, berikut;

Grafik 3.8 Menggunakan Hak Pilih Bagian Dari Partisipasi Politik



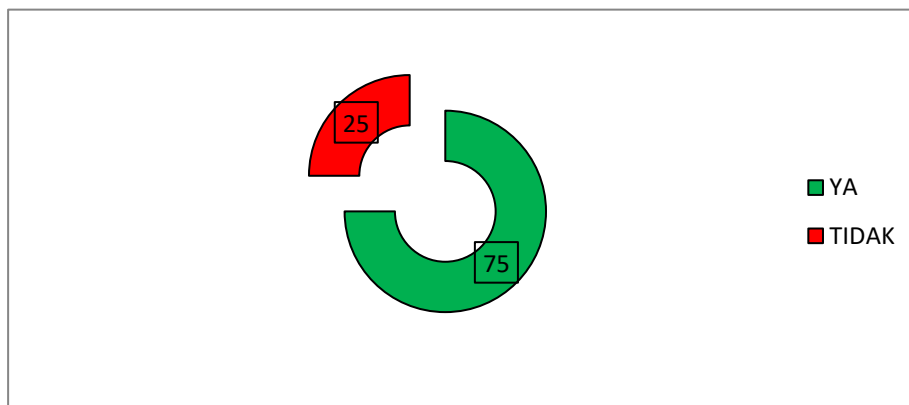
Sumber: Data Kuesioner

Dari data diatas telah terlihat jika 84 reponden menyatakan YA, jika penggunaan hak pilih adalah bagian dari partisipasi politik, sementara itu ada 16 responden yang menyatakan TIDAK, jika menggunakan hak pilih adalah bagian dari partisipasi politik.

#### 3.4.8 Kemajuan Jaman Dalam Pemilihan

Kemudian peneliti juga bertanya apakah dengan kemajuan jaman seperti saat ini responden tetap ingin memilih calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2019. Adapun data kuesioner tersebut dapat dilihat pada grafik 3.9, berikut;

Grafik 3.9 Kemajuan Jaman Dalam Pemilihan



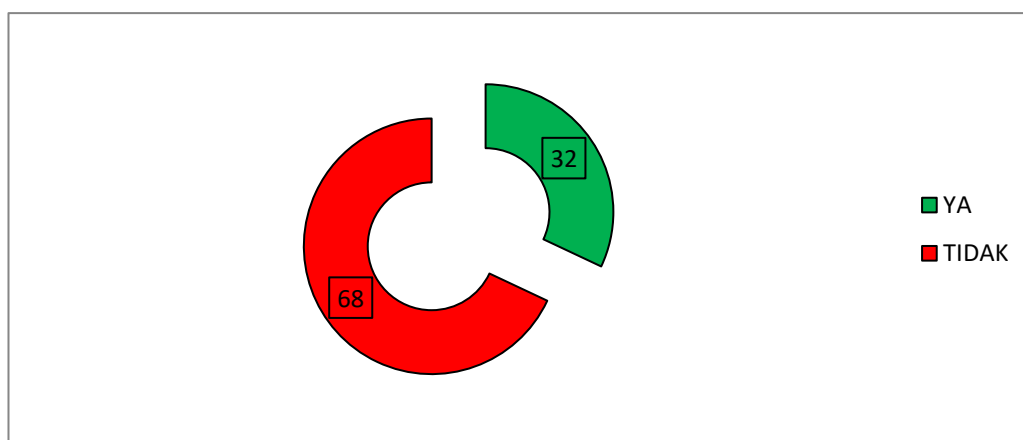
Sumber: Data Kuesioner

Pada grafik 3.9 diatas telah menunjukkan jika dominan responden tidak terlalu melihat soal maju dan tidaknya jaman terkait penggunaan hak pilih. Dalam pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, terungkap jika ada 75 responden akan tetap memilih YA, meski jaman telah maju. Sedangkan ada 25 responden lainnya menyatakan TIDAK akan memilih ketika jaman telah maju.

#### 3.4.9 Status Pekerja Migran Indonesia dan Partisipasi Politik

Kemudian peneliti juga ingin mengungkap pandangan para pekerja migran Indonesia terkait statusnya sebagai pekerja migran Indonesia apakah berpengaruh dalam partisipasi politik. Adapun data kuesioner tersebut dapat dilihat pada grafik 3.10, berikut;

Grafik 3.10 Status Pekerja Migran Indonesia dan Partisipasi Politik



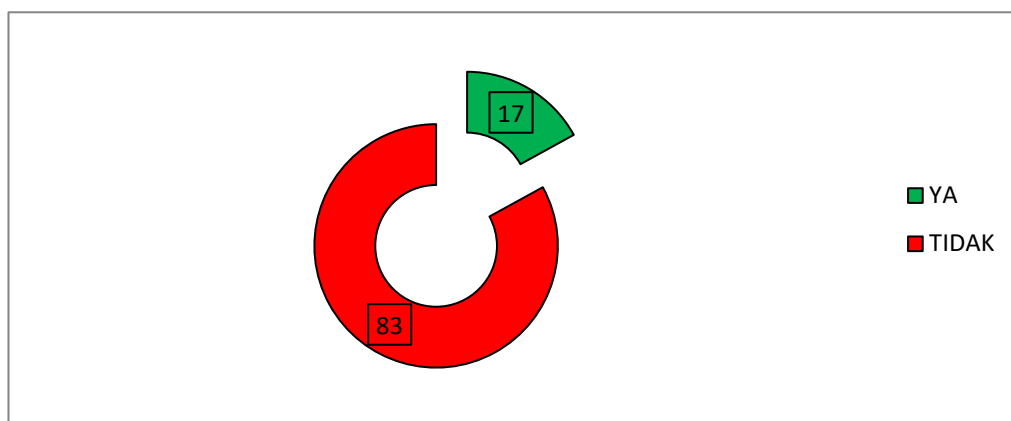
Sumber: Data Kuesioner

Grafik 3.10 menunjukkan jika status pekerja migran Indonesia terdapat 68 responden menyatakan TIDAK mempengaruhi dalam berpartisipasi politik, sementara itu ada 32 responden menyatakan YA mempengaruhi dalam berpartisipasi politik.

### 3.4.10 Jarak dan Partisipasi Politik

Para pekerja migran Indonesia di Hong Kong secara tinggal tentu jauh dari pusat Ibu Kota Negara Republik Indonesia (Jakarta) dan juga jauh dari daerah asalnya, selanjutnya peneliti ingin mengulas lebih dalam jarak yang jauh ini turut mempengaruhi yang bersangkutan dalam berpartisipasi politik. Adapun data kuesioner tersebut dapat dilihat pada grafik 3.11, berikut;

Grafik 3.11 Jarak dan Partisipasi Politik



Sumber: Data Kuesioner

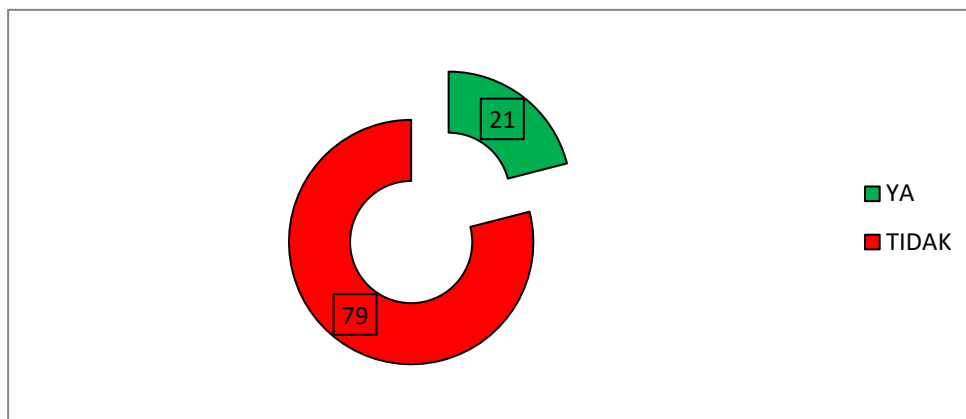
Grafik 3.11 menunjukkan jika jarak antara tempat kerja, pekerja migran Indonesia (Hong Kong) dengan Indonesia cukup jauh, tapi terdapat 83 responden menyatakan TIDAK mempengaruhi dalam berpartisipasi politik, sementara itu 17 responden YA terpengaruh dalam berpartisipasi politik.

### 3.4.11 Masifitas Kerja Relawan atau Tim Sukses

Pekerja migran Indonesia di Hong Kong secara tempat tinggal tentu sangat jauh, kampanye yang dilakukan oleh relawan dan tim sukses dari calon Presiden dan calon Wakil Presiden tahun 2019 tidak semasif atau sesering di Indonesia. Melihat kejadian seperti ini peneliti mengkonfirmasi kepada responden apakah hal

ini turut mempengaruhi dalam berpartisipasi politik. Adapun data kuesioner tersebut dapat dilihat pada grafik 3.12, berikut;

Grafik 3.12 Masifitas Kerja Relawan atau Tim Sukses



Sumber: Data Kuesioner

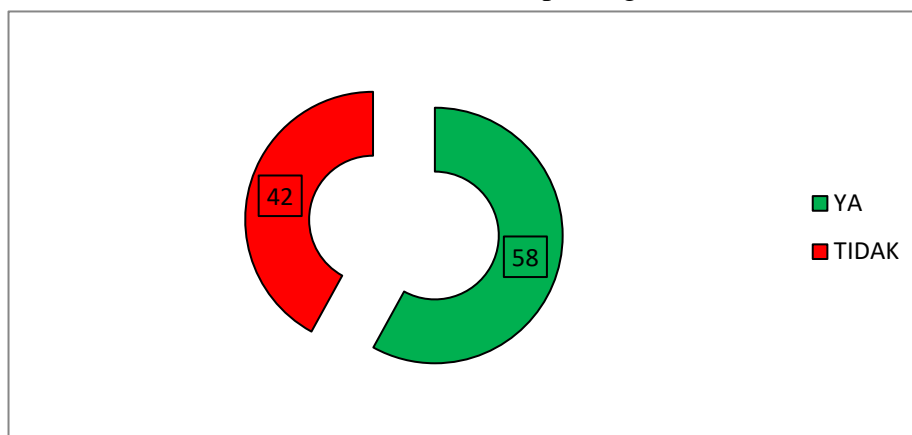
Grafik 3.12 menunjukkan jika masifitas kerja relawan atau tim sukses terdapat 79 responden menyatakan TIDAK mempengaruhi, dalam berpartisipasi politik. Sementara itu ada 21 responden menyatakan YA mempengaruhi dalam berpartisipasi politik.

#### 3.4.12 Konflik Kepentingan

Peneliti memahami jika disetiap perhelatan politik dan kontestasi senantiasa ada konflik kepentingan yang menyertainya, peneliti mencoba meminta padangan dari responden terkait hal tersebut apakah dengan adanya konflik kepentingan itu mempengaruhi partisipasi politik mereka. Sebagaimana peneliti tanyakan dalam kuesioner, adapun data kuesioner tersebut dapat dilihat pada grafik 3.13, berikut;



Grafik 3.13 Konflik Kepentingan



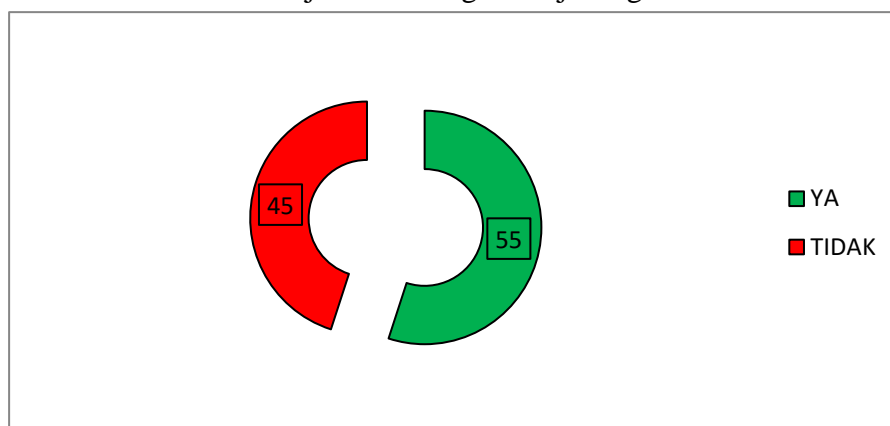
Sumber: Data Kuesioner

Grafik 3.13 menunjukkan jika ada konflik kepentingan apakah responden terpengaruh dalam penyaluran hak politiknya. Terdapat 42 responden menyatakan TIDAK terpengaruh dalam berpartisipasi politik, sementara itu ada 58 responden menyatakan YA terpengaruh dalam berpartisipasi politik.

#### 3.4.13 Kebijakan tentang Pekerja Migran Indonesia

Selanjutnya peneliti mencoba bertanya pada responden terkait pandangan mereka ketika sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait pekerja migran Indonesia namun para pekerja migran Indonesia tidak dilibatkan dalam perumusan tersebut, apakah hal ini turut berpengaruh pada mereka dalam hal berpartisipasi politik. Adapun data kuesioner tersebut dapat dilihat pada grafik 3.14, berikut;

Grafik 3.14 Kebijakan tentang Pekerja Migran Indonesia



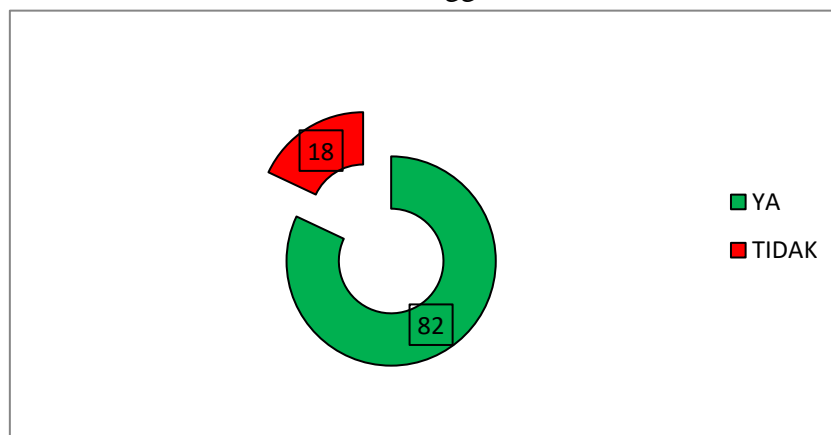
Sumber: Data Kuesioner

Grafik 3.14 menunjukkan jika keterlibatan pekerja migran Indonesia pada proses penyusunan kebijakan oleh pemerintah, apakah ini berpengaruh dalam partisipasi politik. Terdapat 45 responden menyatakan TIDAK mempengaruhi dalam berpartisipasi politik, sementara itu ada 55 responden menyatakan YA mempengaruhi dalam berpartisipasi politik.

#### 3.4.14 Menggunakan Hak Pilih

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada responden soal penggunaan hak pilih mereka dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Adapun data kuesioner tersebut dapat dilihat pada grafik 3.15, berikut;

Grafik 3.15 Menggunakan Hak Pilih



Sumber: Data Kuesioner

Pada grafik diatas menunjukkan terdapat 82 responden menyatakan YA bahwa mereka menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Sementara itu ada 18 responden menyatakan TIDAK menggunakan hak pilih mereka.

#### 3.4.15 Harapan terhadap Pemerintah Republik Indonesia

Pada pertanyaan akhir kuesioner, peneliti mencoba menggali soal harapan responden terhadap pemerintah saat ini. Berikut kami tuliskan beberapa harapan yang diungkapkan oleh responden yang dituliskan melalui kuesioner yang disebar oleh peneliti. Responden berharap membangun pemerintahan yang stabil baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanannya. Sementara itu responden lain berharap pemerintah mampu membuka lapangan pekerjaan dengan mendirikan pabrik untuk olahan barang mentah yang ada di Indonesia kemudian menjadikannya komoditas ekspor. Selanjutnya ada yang berharap diberikan layanan terbaik untuk pekerja migran Indonesia seperti *zero cost* dan penempatan pejabat yang kompeten dalam penanganan pekerja migran Indonesia di negara penempatan.

### **3.5 Dinamika Partisipasi Politik Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa sumber, menyatakan bahwa mereka merasa senang karena ikut berpartisipasi politik untuk kemajuan negara Indonesia setidaknya 5 tahun kedepan. Pekerja migran Indonesia di Hong Kong antusiasme dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang dilakukan setiap 5 tahun sekali.

”Senang sekali ya bisa ikut berpartisipasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, walaupun kita berada di negara yang berbeda. Kesannya itu berbeda dengan di Indonesia, waktu datang ke tempat pemungutan suara, saya bareng bersama teman-teman yang lainnya”. (Wawancara dengan Siti Arofah salah satu pekerja migran Indonesia di Hong Kong, pada 10 November 2022)

Saat pelaksanaan pemilihan di Hong Kong ada di beberapa tempat antara lain, di *Queen Elizabeth Stadium* (Wan Chai) dan *District Kai Fong Association Hall* (Tsim Sha Tsui). Selain itu, pekerja migran Indonesia juga berperan aktif dalam kegiatan politik lainnya contohnya diskusi atau bertukar pikiran, arisan, membikin kelompok belajar serta ikut dalam organisasi yang sifatnya keagamaan maupun yang bersifat kedaerahan. Membicarakan tentang kegiatan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang berlangsung di Hong Kong sangat menarik, mengingat Hong Kong negaranya demokratis. Ini berbeda dengan negara-negara penerima pekerja migran Indonesia di wilayah Timur Tengah. Sementara itu, jumlah pemilih di Hong Kong yang masuk dalam daftar pemilih, baik daftar pemilih tetap luar negeri, daftar pemilih tambahan luar negeri, dan daftar pemilih khusus luar negeri adalah sebanyak 181.014 (seratus delapan puluh satu ribu empat belas) orang.

Dari penghitungan surat suara dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di 31 tempat pemungutan suara yang ada di Hong Kong dapat terlihat di Tabel 3.16, sebagai berikut;

Tabel 3.16 Data pemilih di Hong Kong

Jenis Kelamin	Pemilih (DPT,DPTb, DPK)		Pegguna Hak Pilih		Prosentase Pemilih: Pengguna Hak Pilih
	Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase	
Laki-Laki	1.138	0,6 %	364	0,8 %	31,98 %
Perempuan	179.876	99,4 %	46.146	99,2 %	25,65 %
Jumlah	181.014	100 %	46.510	100 %	25,69 %

Sumber: Data diolah KPU RI

Berdasarkan data perhitungan dari surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 partisipasi pekerja migran Indonesia atau warga negara Indonesia yang berada di Hong Kong sebesar 25,69%. Persentase angka partisipasi ini sangat kecil jika dihitung dari jumlah daftar pemilih yang tercatat secara keseluruhan. Dari daftar pemilih sebanyak 181.014 (seratus delapan puluh satu ribu empat belas) orang, yang menggunakan hak pilihnya, baik melalui pos maupun datang secara langsung ke tempat pemungutan suara sebanyak 46.510 (empat puluh enam ribu lima ratus sepuluh) orang.

Mengharapkan tingginya partisipasi politik dari kalangan pekerja migran Indonesia di Hong Kong adalah sebuah praktik yang mempunyai tantangan tersendiri. Peneliti juga berusaha menggali informasi lebih jauh dengan melakukan wawancara, sebagai narasumber Wiji Pasianie selaku tim sukses calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum tahun 2019 mengenai tantangan dan kendalanya dalam rangka mendorong partisipasi politik pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Penjelasannya adalah sebagai berikut;

“Terkait partisipasi politik pekerja migran Indonesia di Hong Kong dipengaruhi banyak faktor salah satunya adalah adanya waktu libur diakir pekan. Dalam kontek libur diakir pekan adalah pekerja migran Indonesia yang bekerja

sebagai *domestik workers* mendapatkan jatah libur dan secara aturan memang ada libur diakhir pekan. Tapi untuk urusan lain seperti kampanye atau menjadi tim sukses mereka cenderung pasif. Pada dasarnya kita tidak mau hak politik teman-teman selaku warga negara hilang begitu saja”. (Wawancara melalui telepon dengan pekerja migran Indonesia di Hong Kong, 20 Mei 2022)

Sikap politik yang pasif dari pekerja migran Indonesia di Hong Kong bukan tanpa alasan, mengingat selama 6 (enam) hari mereka bekerja secara penuh didalam rumah, maka 1 (satu) hari yaitu pada hari minggu mereka gunakan untuk melepas lelah. Berbeda-beda cara mereka dalam mengekspresikan dihari libur, sekedar kumpul dengan teman-teman di taman, mengikuti acara pengajian yang diadakan oleh sekelompok pekerja migran maupun ikut dalam arisan. Selain masalah angka partisipasi yang rendah juga ada kejadian-kejadian yang dialami saat pencoblosan.

Berbagai kejadian terjadi dilapangan saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia di Hong Kong, ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu pekerja migran Indonesia di Hong Kong:

”Banyak kejadian yang terjadi saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden beberapa waktu yang lalu, seperti yang saya alami sendiri yaitu: antrian tidak diatur dengan rapi oleh panitia sehingga berdesak-desakan, orang yang mau mencoblos ingin cepat-cepat, akhirnya dorong-dorongan terjadi dan untungnya kondisi itu bisa dikendalikan oleh pihak keamanan yang ada dilokasi. Saya juga membaca berita, ada yang mau mencoblos tapi waktu pencoblosan sudah habis akhirnya tidak diperbolehkan sama panitia. Mungkin kejadian seperti ini atau yang lainnya banyak tapi memang saya tidak mengetahui secara pastinya”. (Wawancara melalui telepon dengan Siti Munawaroh salah satu pekerja migran Indonesia di Hong Kong, pada 11 November 2022)

Selain kejadian diatas ada juga kejadian lainnya akan tetapi ditempatnya yang berbeda. Sekelompok orang yang diduga warga negara Indonesia di Hong Kong memaksa masuk ke lokasi tempat pemungutan suara. Mereka masuk area pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diduga karena kecewa karena tak bisa mencoblos di

tempat pemungutan suara *Queen Elizabeth Stadium*, Wan Chai, Hong Kong. Ketua panitia pengawas pemilu Hong Kong dan juga ketua panitia pemilihan luar negeri, dalam surat resminya membenarkan dengan adanya kejadian tersebut. Orang yang memaksa masuk ke tempat pemungutan suara sewaktu acara pemilihan telah selesai.

Beberapa orang dari kelompok tersebut, sebelumnya sudah terlihat di area gedung dari pagi. Sekelompok orang masuk ke lokasi sekitar pukul 20.30 waktu Hong Kong, mereka masuk setelah acara pemilihan ditutup. Pemilihan umum di Hong Kong ditutup pada jam 19.40 waktu Hong Kong. Sesaat sebelum kejadian terjadi, panitia bersama pengawas pemilihan telah memastikan bahwa seluruh konstituen yang mempunyai hak pilih sudah memilih sebelum waktu pemilihan ditutup. Para konstituen dipastikan telah berada diluar lokasi acara pada pukul 19.15. Sebelum menutup pintu masuk lokasi acara tempat pemilihan, tim keamanan dari polisi Republik Indonesia (Polri) dan juga pihak keamanan setempat serta tim pengawas dari komisi pemilihan umum telah melakukan penyisiran. Penyisiran dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi konstituen yang tertinggal didalam lokasi pencoblosan<sup>14</sup>. Masalah insiden tersebut panitia pemilihan luar negeri juga sudah memberikan pernyataan secara resminya.

Terkait tragedi setelah pemilihan ditutup, panitia pengawas pemilihan umum Hong Kong dan panitia pemilihan luar negeri bersepakat untuk tidak memberi izin kepada 20 orang masuk kedalam lokasi acara. Keputusan ini mengacu pada peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2019 yang mengatakan bahwa

---

<sup>14</sup> Rosana Christy Francisca, "20 Orang Diduga Mengacaukan TPS Pemilu 2019 di Hong Kong," tempo.co, April 16, 2019, <https://pemilu.tempo.co/read/1196076/20-orang-diduga-mengacaukan-tps-pemilu-2019-di-hong-kong>. Diakses pada tanggal 28 oktober 2022.

proses pencoblosan berlangsung dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 19.00 waktu di Hong Kong. Menurut aturan itu, panitia pengawas pemilihan umum dan panitia pemilihan luar negeri mengatakan bahwa mereka mempunyai sikap untuk menegakkan aturan yang sudah dibikin oleh negara bukan melarang hak warga negara untuk memilih pemimpinnya<sup>15</sup>.

Dinamika yang sudah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa kesadaran politik pekerja migran Indonesia di Hong Kong sudah terbangun akan tetapi ini masih butuh sosialisasi dan dukungan dari pemerintah. Dukungan, sebagai warga negara untuk menggunakan hak politiknya secara benar. Sosialisasi, bagaimana menggunakan hak politik akan tetapi tidak merugikan hak politik orang lain.

### **3.6 Faktor Utama Partisipasi Politik Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong**

Partisipasi politik warga negara dalam hal ini adalah pekerja migran Indonesia di Hong Kong sangat berperan penting untuk membangun sebuah negara. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019 adalah satu wujud partisipasi politik. Akan tetapi partisipasi politik pekerja migran Indonesia di Hong Kong pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mullaeli selaku tim sukses calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2019, dalam hal ini menyatakan bahwa:

---

<sup>15</sup> Saubani Andri, "PPLN-Panwaslu Hong Kong Bantah Larang Pemilih Menyoblos," *Republika.co.id*, April 15, 2019, <https://www.republika.co.id/berita/pq0da8409/pplnpanwaslu-hong-kong-bantah-larang-pemilih-menyoblos>. Diakses pada tanggal 28 oktober 2022.



“Kebanyakan pekerja migran Indonesia di Hong Kong khususnya saya sendiri, memiliki pertimbangan untuk menggunakan hak pilih pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 yang lalu. Dimana saya memilih calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang mampu merubah kedepan lebih baik, bagi pekerja migran dan juga memiliki konsen terkait status kami sebagai pekerja migran Indonesia. Contohnya bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berjanji akan menjamin perlindungan dan kepastian hukum kepada kami yang statusnya sebagai pekerja migran Indonesia di Luar negeri (Wawancara lewat telepon dengan pekerja migran Indonesia di Hong Kong, 20 Mei 2022)”.

Mengacu pada fakta dan temuan diatas, peneliti turut menggali pendapat beberapa responden. Berikut pendapat Nani Wijayanti selaku pekerja migran Indonesia yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang berorientasi pada pekerja migran Indonesia, ia menyatakan bahwa:

“Sejauh ini sudah banyak mengalami perbaikan dari pemerintah dari segi kebijakannya terhadap pekerja migran Indonesia, akan tetapi lebih baik lagi jika pemerintah memberikan peraturan yang meringankan pekerja migran Indonesia. Contohnya kami masih keberatan dengan adanya sistem potongan gaji yang lebih dari 6 bulan dan proses penapungan yang begitu panjang sehingga kita tidak tahu kapan akan berangkatnya, itu akan berdampak uang yang kita punya selama hidup dipenapungan”. (Wawancara lewat telepon dengan pekerja migran Indonesia di Hong Kong, 20 Mei 2022).

Penjelasan Nani Wijayanti tersebut dapat dipahami bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang memiliki fokus pada perumusan kebijakan yang berorientasi pada pekerja migran Indonesia. Tentunya ini memiliki pengaruh pada pekerja migran Indonesia dalam berpartisipasi politik pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Sementara itu juga ada pendapat lain yang membicarakan soal kebijakan yang berorientasi pada pekerja migran Indonesia. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Nunuk Margiati pekerja migran Indonesia di Hong Kong yang berprofesi sebagai asisten pengasuh orang tua, begini menurutnya:

“Memberikan layanan terbaik untuk pekerja migran tanpa membuat peraturan yang bertele-tele. Terapkan zero cost bagi pekerja migran Indonesia. Tempatkan orang yang benar-benar tahu kondisi lapangan untuk mengetahui apa, bagaimana serta cara menangani ketika ada sebuah permasalahan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia”. (Hasil wawancara lewat telepon dengan pekerja migran Indonesia di Hong Kong, 20 Mei 2022).

Sementara itu, berkaitan dengan konflik kepentingan pejabat publik beberapa responden juga menyatakan jika hal ini cukup mempengaruhi. Namun salah satu responden berpandangan agar pejabat terpilih untuk konsisten pada visi dan misi serta program kerja yang sudah mereka buat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Siti Nur Asiyah selaku pekerja migran Indonesia di Hong Kong yang berprofesi sebagai perawat orang tua. Begini pernyataannya saat peneliti wawancarai:

“Konsisten dengan visi dan misi serta program kerja. Selain itu juga yang pertama, perlu perbaikan dari segi moral dengan meningkatkan edukasi dan agama sebagai fundamental masyarakat yang berwawasan dan beretika. Kedua adalah ekonomi sebagai tiang negara dengan mempermudah masyarakat berkreasi tentunya dengan batasan dan aturan yang jelas. Indonesia banyak dengan orang-orang yang kreatif harusnya didukung dan difasilitasi bukannya dimatikan. Ketiga adalah mempertahankan, menghargai dengan menanamkan rasa cinta terhadap budaya asli Indonesia, termasuk adat istiadat kita yang unik dan menarik. Terakhir segi pariwisata, tingkatkan dengan menjaga, merawat, kebersihan, serta meningkatkan bahasa internasional untuk memikat wisatawan manca negara untuk hadir. Sebenarnya pekerja migran Indonesia juga membantu mempromosikan pariwisata maupun budaya yang ada di Indonesia. Tetapi itu belum diakui oleh pemerintah”. (Wawancara lewat telepon dengan pekerja migran Indonesia di Hong Kong, 20 Mei 2022).

Diatas sudah dijelaskan tentang data dan fakta penemuan dilapangan dan demokrasi di Indonesia sudah berjalan sebagaimana mestinya, yang mana rakyat Indonesia mempunyai hak memilih dan juga mempunyai hak untuk dipilih. Berkaitan dengan hak memilih, pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong memahami betul. Ini terlihat dari survey dari 100 orang yang disurvei, ada 82 responden yang menjawab bahwa mereka ikut berpartisipasi politik dalam

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Hong Kong. Hasil survey ini sejalan dengan pemberitaan dimedia.

Ini seperti yang diutarakan oleh pegiat aktivis buruh migran di Hong Kong dan sekaligus ketua Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) Sringatin. Sringatin berkata bahwa saat pencoblosan cukup ramai bahkan ada beberapa orang pekerja migran Indonesia yang gagal menyalurkan hak politiknya di *Wanchai*, Hong Kong. Sringatin, masuk dalam daftar akan tetapi tidak mendapatkan undangan untuk memberikan hak pilihnya. Pada akhirnya ia berhasil memberikan hak suaranya, karena ia datang dipagi hari untuk mengantri. Ia menceritakan bahwa kacaunya suasana pemilihan memang sejak awal sudah terlihat yaitu dengan adanya ketidakberesan dalam pengaturan barisan. Dari pagi yang mendapatkan undangan dan yang tidak dapat undangan akan tetapi terdaftar, dicampur menjadi satu. Pencampuran ini menjadikan barisan semakin panjang, memperlama pencoblosan, serta menguras energi, itu yang menjadi sebabnya.

Sringatin juga bertanya, data pemilih yang dipake oleh penyelenggara. Ia juga berkata selain tidak mendapatkan undangan untuk memilih, banyak pekerja migran yang lainnya, tidak bisa mencoblos lewat metode pos dikarenakan mereka tidak mendapatkan kertas suara. Pihaknya juga mempertanyakan kalau konsulat jendral Republik Indonesia (KJRI) di Hong Kong tidak mempunyai data baru? padahal setiap dua tahun sekali ada yang namanya perbaharuan data (*renew contract*). Setiap *renew contract* selalu ada perubahan data<sup>16</sup>. Antusiasme dengan tidak

---

<sup>16</sup> Wijaya Callistasia, "Ratusan orang tak bisa nyoblos di Australia dan Hong Kong, pemantau pemilu sebut 'implementasi amburadul,'" April 15, 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47933221>. Diakses pada tanggal 28 oktober 2022.

dibarengi dengan perbaikan pelayanan akan menimbulkan sebuah masalah baru. Masalah tahapan sebelum pemilihan dan saat pemilihan, ada masalah-masalah yang lain muncul, yang harus menjadi perhatian serius dari panitia pemilihan luar negeri. Supaya kedepan tidak merugikan lagi hak politik warga negara untuk memilih Presiden dan Wakil Presidennya. Disamping itu pihak panitia pemilihan dan juga pengawas pemilihan harus mampu mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.